

BAB IV

A. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang mana sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 kelompok pengemudi taksi *online* mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung pada tanggal 2 Mei 2017 yang menganggap Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek bertentangan dengan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro Menengah serta bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setelah gugatannya diterima dan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang mana telah mengganti atau menghapus peraturan yang lama yakni Permenhub Nomor PM 26 Tahun 2017. Maka dari itu setelah dikeluarkannya

Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 peneliti melakukan penelitian terhadap penerapan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 dikalangan pengemudi taksi *online*.

Hasil wawancara dengan *driver* taksi *online* di sekitar kawasan Palembang Square Mall.Pertama dengan bapakDedi Iskandar Hasan dengan plat kendaraan BG 1609 RY didalam wawancara yang di lakukan bapak Dedi Iskandar Hasan mengatakan adanya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek tidak berpengaruh secara signifikan terhadap dirinya sebagai *driver* taksi *online* menurutnya meskipun tidak adanya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek secara ekonomis Dedi Iskandar Hasan masih bisa mendapat penumpang dan tidak mempengaruhi pendapatannya dikarenakan ada tidaknya orderan atau penumpang yang didapatkan tergantung pada performa atau sering tidaknya menghidupkan aplikasi gojek atau seberapa sering mendapatkan pelanggan setiap minggunya mempengaruhi ranking yang telah dibuat oleh pihak PT Gojek Indonesia sebagai

sebuah sistem yang dapat mengatur dapat atau tidaknya orderan tergantung pada sering tidaknya *driver* mendapat penumpang dan pada komen yang dapat ditulis oleh penumpang. Pendapatan yang didapatkan perharinya tidak tentu tergantung pada orderan yang masuk sebelum adanya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 atau setelah adanya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 pendapatan tetap berkisar antara Rp 350.000

Menurutnya peraturan ataupun payung hukum dibuat untuk mereka yang bermasalah selama dirinya tidak melakukan kesalahan maka payung hukum yang disediakan. Menurutya sebagai driver ia hanya berurusan kepada PT Gojek Indonesia selaku penyedia jasa dan Dedi Iskandar Hasan mengatarakan sebagai *driver* mereka tidak dapat menuntut banyak mereka hanya dapat bekerja dengan sebagaimana mestinya, dikarenakan selama Dedi Iskandar Hasan menjadi *driver* taksi *online* tidak pernah mendapat masalah apapun dan tidak menuntut apapun. Namun dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

Umum Tidak dalam Trayek juga berguna sebagai payung hukum dan perlindungan bagi pengemudi taksi *online*¹.

Kedua menurut Deddi Utomo sebagai *driver* taksi online dengan mobil Daihatsu Xenia plat nomor kendaraan BG1646EC Dedi Utomo Mengatakan Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah itu perlu dan tidak perlu, namun dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek memberikan kepastian hukum kepada *driver* taksi *online* serta dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek memberikan kesetaraan antara taksi *online* dan taksi konvensional serta keberadaannya diakui berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek². Dari sini pendapatan untuk jarak per/km telah naik sebesar Rp.14.000, sehingga dengan adanya tarif batas atas dan batas bawah membuat

¹Dedi Iskandar Hasan (Wawancara langsung) pada tanggal 16 Juni 2019 di Pukul 14.30 WIB kawasan Palembang Square Mall.

²Dedi Utomo. (Wawancara langsung) pada tanggal 16 Juni 2019 Pukul 15.00 WIB di kawasan Palembang Square Mall.

pendapatannya mengalami kenaikan namun tidak banyak dikarenakan dengan naiknya harga per/km batas atas dan batas bawah mengalami penurunan penumpang namun persentase penurunnya tidak besar. biasanya pendapatan perhari dahulu sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 kurang lebih Rp.250.000 sekarang bisah kurang lebih Rp. 300.000-Rp. 400.000.

Ketiga Menurut Ong Hui Thiong yang berprofesi sebagai pengemudi taksi *online* dengan menggunakan mobil Toyoto Calya plat kendaran BG1467US menurutnya dengan di keluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek mempunyai sisi positifnya yaitu membuat pengaturan hukum transportasi *online* menjadi ada dan jelas sehingga dalam penerapannya dapat memberikan rasa aman karena dianggap legal di Indonesia serta keberadaanya dianggap setara dengan taksi konvensional.

Namun disisi lain di keluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek berpengaruh dengan tarif atau target

(insentif) yang selama ini mencapai 18% kini menjadi 13% sehingga membuat pendapatannya sebagai *driver* taksi *online* menurun dikarenakan didalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek juga mengatur masalah tarif insentif (bonus) yang ada selama ini menjadi menurun semisal selama ini perhari bisa mencapai Rp 350.000,00 sekarang menjadi Rp. 250.000,00³.

Keempat menurut Rio Satria dengan plat kendaraan BG 1547 IA sebagai pengemudi taksi *online* Rio Mengatakan dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek memberikan rasa aman, serta menjadi jaminan bagi pengemudi taksi *online*. Menurutnya dengan adanya pengaturan tarif batas atas dan batas bawah yang telah ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek memberikan keuntungan bagi pengemudi taksi *online* tarif batas

³Ong Hui Thiong.(Wawancara langsung) pada tanggal 16 Juni 2019 Pukul 15.30 WIB di kawasan Palembang Square Mall.

bawah yang semula Rp,9000,00 per/km menjadi Rp.14.000,00 per/km sehingga lebih mensejahterakan pengemudi taksi *online*. Namun dilain sisi dengan adanya kenaikan tarif batas atas dan batas bawah membuat sebagian penumpang mengubah jalur alternatif untuk melakukan perjalanan, seperti menunggakan angkot yang lebih murah, dengan adanya hal seperti itu juga berdampak pada pendapatan. Namun pengurangan tersebut tidak terlalu signifikan masih dapat dikatakan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang mengatur tentang tarif batas atas dan batas bawah menguntungkan untuk kesejahteraan pengemudi taksi *online*⁴. Pendapatan sebelum adanya bahwa Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 kurang lebih Rp 250.000 sekarang kurang lebih Rp. 300.000- Rp.400.000 per/hari.

Kelima Menuru Heri Eska yang berprofesi pengemudi taksi *online* dengan plat kendaraan BG 1852AY Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam

⁴Rio Satria.(Wawancara langsung) pada tanggal 16 Juni 2019 Pukul 16.00 WIB di kawasan Palembang Square Mall.

Trayek itu sangat diperlukan, selain untuk perlindungan juga untuk mensejahterakan driver dan sebagai wujud melegalkan taksi *online*⁵. Pendapatan perhari Heri Eska sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 tidak memiliki perubahan yang signifikan menurutnya sama saja kurang lebih Rp 350.000 per/hari.

Tabel I.

Pendapat *driver* taksi *online* tentang penerapan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017.

⁵Heri Eska(Wawancara langsung) pada tanggal 16 Juni 2019 Pukul 16.30 WIB di kawasan Palembang Square Mall.

1	Dedi Iskandar Hasan	Menurut Dedi Iskandar Hasnan dalam penerpannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap dirinya sebagai <i>driver</i> taksi <i>online</i> menurutnya meskipun tidak adanya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 secara ekonomis Dedi Iskandar Hasan masih bisa mendapat penumpang. Namun dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 juga sebagai bentuk pengaturan yang lebih jelas terhadap keberadaan <i>taksi online</i> .
2	Dedi Utomo	Menurut Dedi Utomo Peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu perlu dan tidak perlu, namun dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 memberikan kepastian hukum kepada <i>driver</i> taksi <i>online</i> serta memberikan kesetaraan antara taksi <i>online</i> dan taksi konvensional.
3	Ong Hui Thiong	Menurut mempunyai Ong Hui Thiong dalam penerapan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 sisi positifnya yaitu membuat pengaturan hukum transportasi <i>online</i> menjadi ada dan

		jelas sehingga dalam penerapannya dapat memberikan rasa aman karena dianggap legal di Indonesia serta keberadaanya dianggap
4	Rio Satria	Menurut Rio Satria dalam penerapannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek memberikan rasa aman, serta menjadi payung hukum bagi pengemudi taksi <i>online</i> .
5	Heri Eska	Menurut Heri Eska Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 itu sangat diperlukan, selain untuk perlindungan juga untuk mensejahterakan driver dan sebagai wujud melegalkan taksi <i>online</i> .

Sumber table diolah dari hasil wawancara dengan pengemudi taksi *online* di Kawasan Palembang Square Mall.

Dari tabel I Dapat disimpulkan bahwasannya dalam penerapannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 memberikan payung hukum yang jelas bagi pengemudi taksi *online* serta adanya pengaturan yang lebih jelas terhadap keberadaan *taksi online* selain itu dalam penerapannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 memberikan kesetaraan antara taksi *online* dan taksi

konvensional. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 dalam pengaturannya juga untuk memikirkan kesejahteraan pengemudi taksi *online*.

Tabel II

Pendapatan *driver* taksi *online* sebelum dan setelah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017

No	Nama <i>driver</i>	Sebelum	Sesudah
1	Dedi Iskandar Hasan	Kurang lebih Rp 350.000 per/hari	Pendapatan Dedi Iskandar Hasan sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 sama saja seperti telah dikeluarkannya berkisar antara Rp 350.000 Menurutnya pendapatan didapat tergantung orderan dan nilai yang diberikan konsumen yang diatur oleh

			PT Gojek Indonesia
2	Dedi Utomo	Kurang lebih Rp.250.000 per/hari.	Setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 pendapatnya mengalami peningkatan menjadi kurang lebih Rp.300.000-Rp.400.000 per/hari

3	Ong Hui Thiong	Kurang lebih Rp 350.000 per/hari	<p>Namun Pendapatan Ong Hui Thiong setelah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 mengalami penurunan . Ong Hui Thiong hanya mendapatkan kurang lebih Rp 250.000 per/hari. Dikarenakan pengaturan tarif insentif yang sebelumnya 18% menjadi 13%</p>
4	Rio Satria	Kurang lebih Rp.250.000 per/hari	<p>Dengan adanya pengaturan tarif batas atas dan batas bawah yang telah ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017\memberikan keuntungan bagi pengemudi taksi <i>online</i> tarif batas bawah yang semula Rp,9000,00</p>

			per/km menjadi Rp.14.000,00 sehingga membuat pendapatannya naik menjadi kurang lebih Rp.350.000-Rp 400.00 per/hari
5	Heri Eska	Kurang lebih 350.000 per/hari	Kurang lebih Rp 350.000 per/hari

Sumber tabel diolah dari hasil wawancara dengan pengemudi taksi *online* di Kawasan Palembang Square Mall

Dari tabel II dapat disimpulkan bahwa sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 dari segi pendapatan tidak jauh berbeda dari sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 namun masih mengalami kenaikan dari sebelumnya.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017.

1. Pengemudi (*Driver*) taksi *online*.

Pengemudi (*driver*) mempunyai peran yang sangat signifikan dalam Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 dikarenakan dikeluarkannya Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 berdasarkan tuntutan para pengemudi taksi *online* di

Mahkamah Agung Tanggal 2 Mei 2017 dan pengemudi driver sebagai faktor penerapan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 dikarenakan menerima dampak yang besar guna untuk keamanan dan kesejahteraan pengemudi taksi *online*.

2. Peran PT Gojek Indonesia

Sebagai wadah dari salah satu taksi *online* yang ada di Indonesia PT Gojek Indonesia memiliki peran sebagai aplikator yang dapat memonitor segala macam kepentingan mitra Gojek. Serta PT Gojek Indonesia yang berkordinasi dengan pemerintah dalam menentukan aturan dan agar peraturan tersebut dapat diterima oleh masyarakat Indonesia terkhusus pengemudi dan *customer*.

PT Gojek Indonesia memberikan akses kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di di Indonesia baik untuk masa kini dankedepannya. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Juga dalam penerapan Permenhub Tahun

2017 PT Gojek Indonesia harus Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan⁶.

3. Pelanggan (*Costumer*)

Peran pelanggan (*Costumer*) dengan adanya pelanggan membantu pengemudi taksi *online* dalam mendapatkan pendapatan yang dapat menunjang kehidupan pengemudi. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 juga membuat taksi *online* menjadi legal sehingga tidak memberikan rasa was-was bagi penumpang. Serta penumpang juga bisa membantu pihak aplikator dan pemerintah dengan member saran ataupun masukan guna untuk kemajuan taksi *online*. Pelanggan bisa memberikan kritik dan saran dengan menghubungi call center gojek untuk pelanggan: 021.50251110 dan email gojek : customerservice@go-jek.com⁷

4. Pemerintah

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang

⁶<https://www.go-jek.com/> diakses 18 juni 2019

⁷<https://www.go-jek.com/blog/palembang/> diakses pada tanggal 18 Juni 2019.

dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek harus tetap berjalan⁸.

Aturan tersebut mencakup ketentuan menjalankan sebuah usaha sebagai perusahaan angkutan, yang wajib berbadan hukum sesuai dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Badan hukum yang dimaksud dapat berupa Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Untuk koperasi, keanggotaan atau asetnya diperbolehkan atas nama perorangan.

Selain itu, juga disebutkan mengenai persyaratan minimal kendaraan. Persyaratan minimal ini berlaku bagi badan hukum dengan bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum. Sedangkan bagi perorangan yang memiliki kurang dari lima kendaraan dapat bergabung dalam wadah koperasi.

Meskipun, saat ini Permenhub tersebut tengah menuai protes di kalangan pengemudi angkutan online. Menurut Budi Karya, Permenhub tersebut harus tetap berjalan untuk kesetaraan baik pengemudi transportasi online maupun konvensional. Ia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan upaya persuasif agar Permenhub tersebut dapat diterima dan dilaksanakan. Budi

⁸<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2018012615002292271800/menhub-tegaskan-aturan-soal-angkutan-online-harus-dipatuhi> diakses pada tanggal 15 Juni 2019.

tidak ingin melakukan upaya represif guna terlaksananya Permenhub tersebut. Budi Karya menyebutkan, pihaknya masih akan membahas perihal sanksi terkait penolakan Permenhub tersebut. Budi Karya menjelaskan, agar semua pihak melihat Permenhub tersebut secara menyeluruh. Terkait dengan kuota kendaraan online misalnya, dalam Permenhub tersebut nantinya kuota akan dibatasi per wilayah. Hal itu menurut Budi agar kendaraan online tidak menguasai seluruh bisnis transportasi. Ia mempertimbangkan, dengan aturan tersebut, bisnis transportasi konvensional yang hanya memiliki satu atau dua kendaraan agar tidak tergerus dengan kendaraan online⁹.

Masyarakat akan selalu membutuhkan barang dan jasa yang mereka konsumsi. Pelaku Usaha akan selalu terus berinovasi untuk mendapatkan keuntungan, mencari peluang dengan menciptakan solusi. Kepentingan Pemerintah disini adalah memastikan agar kepentingan umum terlayani dengan baik, tanpa harus membatasi kreativitas Pelaku Usaha. Namun tidak tinggal diam, pelaku usaha juga berupaya memenuhi persyaratan bisnisnya.

⁹<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180126150022-92-271800/menhub-tegaskan-aturan-soal-angkutan-online-harus-dipatuhi> diakses pada tanggal 15 Juni 2019.

Respons terhadap Teknologi Aplikasi atau *Tech Based Business Platforms* pun bermacam-macam. Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, harus dapat menyikapi pertumbuhan teknologi aplikasi sebagai sarana bisnis di Indonesia secara proporsional, dengan melakukan identifikasi secara efektif terhadap permasalahan hukum yang terjadi, siapa subjek hukum yang diatur, dan substansi peraturan seperti apa yang dikeluarkan untuk mengaturnya.

Dari analisis terhadap skema kegiatan bisnis yang dilakukan melalui teknologi aplikasi yang menggunakan sistem elektronik, terdapat banyak aspek-aspek kegiatan yang dinilai perlu diatur oleh Pemerintah sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. Baik kepada masyarakat sebagai konsumen, pelaku usaha yang terlibat, maupun terhadap lingkungan masyarakat Indonesia sendiri secara luas.

Saat ini, terdapat beberapa isu yang harus dicermati oleh Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai Regulator, antara lain:

1. Kedudukan Pelaku Usaha Teknologi Aplikasi dalam skema bisnis, dimana teknologi aplikasi yang dibuat

menghubungkan Konsumen dan Pelaku Usaha Penyedia barang dan jasa;

2. Harus ada regulasi yang jelas dari pemerintah mengenai pemisahan tanggung jawab antara pelaku usaha teknologi aplikasi dengan penyedia barang dan jasa. Dimana, perusahaan teknologi aplikasi sudah seharusnya tidak dapat diminta pertanggung jawaban apabila terjadi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa.

Perkembangan teknologi semakin dinamis. Sementara, proses penerbitan peraturan perundang-undangan Indonesia membutuhkan waktu yang panjang. Pelaku usaha dan masyarakat sangat berharap agar pemerintah dapat menyusun kerangka regulasi yang tepat dan harmonis agar tidak saling bertentangan. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Indonesia untuk menentukan secara tepat sasaran regulasi dalam bidang teknologi aplikasi, khususnya teknologi aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi jual beli menggunakan sistem elektronik¹⁰.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017

¹⁰ Bimo Prasetio dan Sekar Ayu Primandani, Peran Pemerintah Dalam Mengatur Bisnis Jasa Berbasis Teknologi Aplikasi, <http://strategihukum.net/peran-pemerintah-dalam-mengatur-bisnis-jasa-berbasisteknologi-aplikasi> , diakses pada tanggal 15 Juni 2019.

Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Menurut Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dibuat dalam syariah tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk kemaslahatan¹¹.

Ditinjau dari maqasyid syariah dalam hal memelihara jiwa, berdasarkan menjadi tiga peringkat : (1) Memelihara dalam peringkat *dharuriyyat* seperti halnya makanan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan maka dapat mengancam eksistensi jiwa manusia. Kebutuhan pokok manusia dapat dipenuhi dengan mencari rezeki seperti halnya yang dilakukan oleh pengemudi *taksi* online. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek berdampak baik bagi pengemudi *taksi online* dikarenakan dianggap sama kedudukannya dengan *taksi konvensional* dan adanya pengaturan yang jelas mengenai argometer, tarif, wilayah operasi,

¹¹Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Makassar:Kencana,2016) hal 171

kuota atau perencanaan kebutuhan, minimal kendaraan, serta pengaturan kelengkapan surat bermotor dan peran aplikator memberikan jaminan dan kepastian serta kelayakan bagi pengemudi taksi *online*. Dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek membuat pengemudi taksi *online* bisa menjalankan pekerjaannya dengan tenang dan mengurangi pengangguran yang berlaku dikarekan selama ini sebelum adanya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di beberapa daerah di Indonesia terdapat pelarangan izin operasi taksi *online* sehingga menjamin kelangsungan jiwa pengemudi taksi *online* dan menyebabkan tidak mendapatkan pendapatan untuk kelangsungan hidupnya, setelah Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pengemudi taksi *online* dapat beroperasi kembali dan mendapatkan penghasilan seperti semula sehingga berdampak baik bagi kelangsungan hidupnya

Namun terkhusus pengemudi taksi *online* dikota Palembang dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek juga dapat dikategorikan sebagai memelihara jiwa dalam kategori tahsiniyyat yakni tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, atau mempersulit kehidupan manusia dikarenakan meskipun selama ini belum adanya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayeka mereka masih bisa bekerja dengan sebagaimana mestinya dengan mengandalkan hubungan mereka sebagai mitra Gojek Indonesia yang berhubungan dengan PT Gojek Indonesia namun Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek juga berguna sebagai alat pengatur sehingga tidak terjadinya ketidaksetaraan antara taksi *online* dan konvensional.

Serta dalam penelitian yang dilakukan pengemudi taksi *online* juga di kategorikan memelihara Harta (*al-Muhafadzah ala al-Mal*) karena dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan

Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dapat mengatur berbagai transaksi ekonomi untuk meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan pengemudi taksi *online* melalui cara-cara yang halal. pengemuditaksi *online* mereka berhak menjaga harta atau melindungi harta “pendapatan” yang mereka miliki serta di lindungi oleh Undang-Undang untuk kemaslahatan.

Dalam kategori “Hak” dipenelitian yang dilakukan juga bersangkutan dalam hak. Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta-benda, Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain¹². Dalam Islam, pada hakikatnya segala hak yang melekat pada manusia bersumber dari hak-hak Allah. Untuk itu, setiap manusia harus menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan syara” yaitu untuk mewujudkan kemaslatahan pribadi dan kemaslahatan publik (umum)¹³. Menurut pendapat Sudarsono bahwa hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang¹⁴. Selain itu menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Marwan Mas, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, hlm. 120.

¹³ Siti Mujibatun, Pengantar Fiqh Muamalah, Semarang : Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012, hlm. 57.

¹⁴ Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007, hlm. 154. 8

hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut. Dalam perlindungan hak Islam memberikan jaminan perlindungan hak untuk setiap individu. pemerintah juga dapat memaksa pihak tertentu untuk memenuhi hak orang lain jika terjadi suatu perselisihan dalam pemenuhan hak. Perlindungan hak dalam Islam merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Oleh karena itu, diperlukannya suatu kekuasaan untuk menjamin terlindunginya hak agar pelanggaran terhadap hak orang lain tidak berkembang¹⁵. Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendak sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at. Oleh karena itu, pemilik hak dilarang menggunakan haknya untuk hal-hal yang buruk¹⁶.

Dalam penelitian dengan taksi *online* di sekitaran Palembang Square Mall adapun yang dapat ditarik kesimpulan yakni sebelum dan sesudah penerapan terdapat hak-hak driver taksi *online* yang diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Sebelum dikeluarkannya

¹⁵ Ghuftron Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 37

¹⁶ *Ibid.* hlm 38

Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang adanya pengemudi taksi *online* juga wajib mendapatkan hak-haknya untuk menjamin penghidupan yang layak dan diberikan rasa aman serta perlindungan maka dari itu setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang daari hasil penelitian disimpulkan bahwasannya dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang telah memberikan hak-hak pengemudi taksi *online* dengan dibuatnya tarif batas atas dan batas bawah yang memberikan keuntungan kepada pengemudi taksi *online* dikarenakan pendapatan yang didapatkan mengalami kenaikan hal tersebut juga sebagai salah satu wujud pemenuhan hak dan memberikan kemaslahatan bagi pengemudi taksi *online* serta dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang memberikan hak kepada pengemudi taksi *online* untuk dilindungi oleh undang-undang serta jika melihat dari pendapat beberapa pengemudi taksi konvensional mereka mengatakan fenomena munculnya taksi *online* adalah sesuatu yang tidak bisa dihalangi dikarenakan proses akses yang mendunia membuat semacam perubahan-perubahan yang

berdampak baik bagi kelangsungan hidup manusia sehingga mereka yang berprofesi sebagai pengemudi taksi konvensional hanya berharap suatu saat pemerintah memikirkan tarif taksi konvensional agar tidak terjadi perbedaan yang terlalu jauh antara taksi *online* dan taksi konvensional.